

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 22 Juli 2022		No. Surat : B / 016 / PK. OR - 23 / M / 2022	
Alamat Surat		DITUJUKAN KEPADA	
OTAPUDSTRAH		☒ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☒ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	
NO. AGENDA		☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK ☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	
PERIHAL		☐ BIDANG PIAK ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. ☐ BIDANG PDIP ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ KASI KERJASAMA ☐ KASI INOVASI PELAYANAN	
Perubahan narasumber dan data / dokumen.			
CATATAN SEKRETARIS / <i>Sepern kirm ungu staf 1 (Safu) hrs lebih narasumber ke perwakilan OTAPUDSTRAH R.1.</i>			
CATATAN KABID			
NO. AGENDA		YANG MENERIMA	
301 Dkps 2022			
TGL DITERIMA			
28 Juli 2022			



**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M.T.Haryono Perumahan Pemda Kaltim Blok A Nomor 1,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75127. Telepon (0541) 2086525
surat elektronik: kaltim@ombudsman.go.id

Nomor : B/018/PC.05-21/VII/2022

22 Juli 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Permintaan Narahubung dan Data/Dokumen terkait Penilaian
Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Tahun 2022

Kepada Yth.

(Daftar terlampir)

Berkenaan dengan surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor B/2328/PC.05/VII/ 2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tahun 2022 (terlampir) yang menginformasikan bahwa pada tahun 2022 Ombudsman RI kembali melakukan penilaian kepada penyelenggara pelayanan publik melalui produk layanan yang diselenggarakan oleh 24 Kementerian, 15 Lembaga dan 548 Pemerintah Daerah, yang mana tim penilai akan melakukan penilaian secara langsung pada bulan Agustus s.d Oktober 2022.

Lokus penilaian di daerah yaitu Kantor Pertanahan, Kepolisian Resor (Kota), Puskesmas, dan 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana pada tahun ini, Dinas Sosial tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten serta UPT Puskesmas tingkat Kota/Kabupaten juga menjadi bagian dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI sebagai representatif dari Pemerintah Daerah masing-masing, selain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Guna kelancaran dan kemudahan tim kami dalam melakukan penilaian, kami meminta dari masing-masing unit penyelenggara layanan yang menjadi lokus penilaian sebagaimana terlampir agar dapat menunjuk 1 (satu) orang sebagai Narahubung. **Kiranya informasi Narahubung tersebut dapat kami terima paling lambat tanggal 1 Agustus 2022.** Untuk konfirmasi dan keterangan

lebih lanjut dapat menghubungi Asisten Pencegahan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur, Sdri. Iffa Nur Fahmi melalui HP/WA 0851 5857 7794.

Selain itu, dikarenakan penilaian pada tahun ini memiliki konsep berbeda dengan tahun sebelumnya, yang salah satunya adalah bahan penilaian juga didasarkan pada data dan dokumen tertentu. Sehingga, selain permintaan narahubung, kami juga meminta masing-masing instansi yang menjadi lokus penilaian (daftar terlampir) untuk dapat menyiapkan data/dokumen sebagai berikut:

1. Laporan Hasil/ Berita Acara Pengawasan Inspektorat
2. Data Kepegawaian
3. Laporan Analisis Beban Kerja
4. Laporan Hasil/Berita Acara Kegiatan Penjaminan Mutu
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
6. Data Survei Kepuasan Masyarakat
7. SKP Tahunan
8. Laporan Kinerja Bulanan
9. Laporan Evaluasi Pengaduan
10. Laporan Penilaian Eksternal
11. Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Bupati, Peraturan Menteri ATR/BPN, dan Peraturan Kapolri atau peraturan lainnya terkait tugas, fungsi dan kewenangan instansi/OPD
12. Surat Keputusan dan/atau peraturan terkait yang dapat menjelaskan tugas, fungsi, kewenangan pejabat/petugas di bidang pelayanan dan pengelolaan pengaduan
13. Peraturan Kepala Unit Kerja/Satker
14. Laporan Hasil/Berita Acara Kegiatan Pembinaan Pengelola Pengaduan
15. Form Tindak Lanjut/Pesan Elektronik terkait Pengaduan/Pelayanan
16. SK Petugas/Pejabat Pengelola Pengaduan
17. Data/Laporan Jumlah Pengaduan yang diterima selama tahun 2019-2021
18. Data/Laporan Jumlah Pengaduan yang diselesaikan selama tahun 2019-2021

Mohon kiranya dokumen/data tersebut dapat dikirimkan dalam bentuk **softcopy** oleh **narahubung** yang ditugaskan melalui **kaltim@ombudsman.go.id** paling lambat tanggal 10 Agustus 2022, dan dokumen asli ditunjukkan saat tim penilai Ombudsman melakukan penilaian di instansi (jadwal penilaian akan disampaikan kepada masing-masing narahubung).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Perwakilan,



Frederikus Denny Christiyanto

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
3. Walikota Samarinda;
4. Walikota Balikpapan;
5. Walikota Bontang;
6. Bupati Penajam Paser Utara;
7. Bupati Paser;
8. Bupati Kutai Kartanegara;
9. Bupati Kutai Timur;
10. Bupati Kutai Barat;
11. Bupati Berau;
12. Bupati Mahakam Ulu;
13. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur; dan
14. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur.

Lampiran I

Pemintaan Narahubung dan Data/Dokumen terkait
Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh
Ombudsman Tahun 2022

Nomor : B/018/PC.05-21/VII/2022

Tanggal : 22 Juli 2022

Kepada Yth. :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

2. Pemerintah Kota Samarinda:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
- Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda
- Kepala UPT Puskesmas Segiri
- Kepala UPT Puskesmas Wonorejo

3. Pemerintah Kota Balikpapan:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
- Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan
- Kepala UPT Puskesmas Baru Ilir
- Kepala UPT Puskesmas Baru Tengah

4. Pemerintah Kota Bontang:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
- Kepala Dinas Sosial Kota Bontang

- Kepala UPT Puskesmas Bontang Utara
- Kepala UPT Puskesmas Bontang Selatan I

5. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU):

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. PPU
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. PPU
- Kepala Dinas Kesehatan Kab. PPU
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. PPU
- Kepala Dinas Sosial Kab. PPU
- Kepala UPT Puskesmas Penajam
- Kepala UPT Puskesmas Waru

6. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Kartanegara
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara
- Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Kartanegara
- Kepala Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara
- Kepala UPT Puskesmas Rapak Mahang
- Kepala UPT Puskesmas Mangkurawang

7. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Barat
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat
- Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Barat
- Kepala Dinas Sosial Kab. Kutai Barat
- Kepala UPT Puskesmas Melak
- Kepala UPT Puskesmas Barong Tongkok

8. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Timur
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur
- Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur
- Kepala Dinas Sosial Kab. Kutai Timur
- Kepala UPT Puskesmas Teluk Lingga
- Kepala UPT Puskesmas Sangatta Utara

9. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mahakam Ulu
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mahakam Ulu
- Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Mahakam Ulu
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mahakam Ulu
- Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Mahakam Ulu
- Kepala UPT Puskesmas Ujoh Bilang

10. Pemerintah Kabupaten Berau:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Berau
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Berau
- Kepala Dinas Kesehatan Kab. Berau
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Berau
- Kepala Dinas Sosial Kab. Berau
- Kepala UPT Puskesmas Sambaliung
- Kepala UPT Puskesmas Tanjung Redeb

11. Pemerintah Kabupaten Paser:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Paser
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser
- Kepala Dinas Kesehatan Kab. Paser
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paser
- Kepala Dinas Sosial Kab. Paser
- Kepala UPT Puskesmas Kuaro
- Kepala UPT Puskesmas Tanah Grogot

12. Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda

13. Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan

14. Kepala Kepolisian Resor Bontang

15. Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara

16. Kepala Kepolisian Resor Paser

17. Kepala Kepolisian Resor Berau

18. Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara

19. Kepala Kepolisian Resor Kutai Barat

20. Kepala Kepolisian Resor Kutai Timur

21. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda

22. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
23. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang
24. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Penajam Paser Utara
25. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Paser
26. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Berau
27. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara
28. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Timur
29. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat